ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN SIRI ONLINE

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun oleh :

Muhammad Aminun Najib

1702016156

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Aminun Najib

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di – Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Aminun Najib
NIM : 1702016156
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN SIRI ONLINE"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi, mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.Demikian harap dijadikan maklum dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 6 Desember 2021

Pembimbing I,	Pembimbing II
Dr. Ali Imron, M.Ag	**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**
NIP.197307302003121003	**NIP. 197111012996041003**

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-186/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Muhammad Aminun Najib
NIM	:	1702016156
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul	:	**"Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Siri Online"**

Pembimbing I	:	Dr. Ali Imron, M.Ag
Pembimbing II	:	Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	:	Dr. Tolkah, M.A
Penguji II / Sekretaris Sidang	:	Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
Penguji III	:	Dr. Mahsun, M.Ag.
Penguji IV	:	Amir Tajrid, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. Ali Imron, M.Ag.

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah,"[1]

[1] QS. Az-Zariyat ayat 49.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Jumron dan Ibu Siti Nur Inayah yang dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Teman-teman HK D 2017, Hukum keluarga 2017 dan Fakultas syariah dan hukum.
3. Dan teruntuk jodoh saya siapapun itu nanti, yang jelas saya percaya bahwa kamu selalu mendoakan yang terbaik hingga saya bisa mencapai dititik ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammmad Aminun Najib

NIM : 1702016156

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Online di Tengah Pndemi Covid-19**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalamm referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demak, 6 Desember 2021

Deklarator,



Muhammad Aminun Najib

vi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihatdalam tabel berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	*Alif*	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	*Ba*	B	Be
ت	*Ta*	T	Te
ث	*Sa*	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Ha*	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	*Kha*	Kh	Ka dan ha
د	*Da*	D	De
ذ	*Za*	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	*Ra*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sin*	S	Es
ش	*Syin*	Sy	Es dan ye
ص	*Sad*	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	*Dad*	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	*Ta*	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	*Za*	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	*‘Ain*	‘—	Apostrof terbalik
غ	*Gain*	G	Ge
ف	*Fa*	F	Ef
ق	*Qaf*	Q	Qi
ك	*Kaf*	K	Ka
ل	*Lam*	L	El
م	*Mim*	M	Em
ن	*Nun*	N	En
و	*Wau*	W	We
ه	*Ha*	H	Ha
ء	*Hamzah*	__’	Apostrof
ي	*Ya*	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*Faṭhah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*Ḍammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َيْ	*Faṭhah* dan *ya*	Ai	A dan I
◌َوْ	*Faṭhah* dan *wau*	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ◌َ	*Faṭhah* dan *alif*	Ā	A dan garis di atas
ي ... ◌ِ	*Kasrah* dan *ya*	Ī	I dan garis di atas
و ... ◌ُ	*Ḍammah* dan *wau*	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭhah, kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Penyelenggaraan perkawinan dimasa pandemic covid-19 terjadi terhambat, sehingga munculah penyesuaian dalam acara perkawinan dalam hal ini akad nikah dan penyelenggaraan walimah agar bisa tetap terselenggara. Perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadi perantaranya. Salah satunya adalah melakukan akad nikah via online melalui aplikasi video call. Tujuan peneletian ini untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan penyelenggaraan akad nikah via online, sehingga harus ditemukan solusinya yang konkrit.

Jenis penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (library reseach), yaitu bersumber dari buku-buku atau karya-karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti, melalui metode bersifat deskriptif analisis dengan cara mengumpulkan data sekunder meliputi buku, kitab, jurnal, yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis bahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad nikah via online menggunakan aplikasi video call berbasis internet tidak dapat diperkenankan atas sebab keharusan ittihad majlis (satu majlis) secara fisik. Sedangkan perluasan makna ittihad majlis yang dikatakan dapat terealisasi secara daring mengandung kelemahan yang beresiko besar karena sejumlah factor yakni: nikah adalah ibadah, persyaratan al-mu'ayanah, peluang manipulasi, ketimpangan konektivitas, dan terdapat ketentuan pemerintah yang memiliki derajat seperti qanun. Kemudian mengenai nikah siri yang dilakukan adalah sah menurut agama tetapi tidak sah menurut Negara karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pernikahan Online, Pandemi Covid-19.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skrispsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Online Di Tengah Pandemi Covid-19"

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahilliyah* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bmbingan, motivasi kepada penulis, dengan segela kekuranganya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Moh. Shoim S. Ag., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

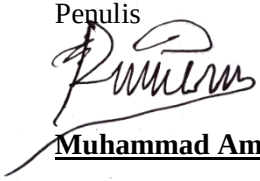
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis, Kedua orang tua bapak dan ibu, dan adek-adekku yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensuport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman hukum keluarga 2017 dan Fakultas Syariah dan Hukum serta fakultas lainya, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
7. Keluarga FOKMAF Semarang dan Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) UIN Walisongo Semarang yang selalu membersamai sampai saat ini dan selalu memberikan bantuan, support dan candaan ketika berproses bersama dan sampai saat skripsi ini terselesaikan.
8. Pengasuh pondok pesantren AL-ANWAR Romo KH.Abdul Basyir Hamzah yang telah mendidik dan mendoakan hingga terselesaikan skripsi ini.
9. Pengasuh pondok pesantren Al-Muqorrobin KH.Abdul Khamid yang telah mendidik dan mendoakan hingga terselesaikan skripsi ini. Tak ketinggalan pula santri-santri Al-Muqorrobin seperjuangan yang telah menemani dan mensupport sehimgga terselesaikan skripsi ini.

Akhirnnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segela pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua

mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang , 6 Desember 2021

Penulis



Muhammad Aminun Najib

NIM: 1702016156

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
MOTTO ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**
ABSTRAK ..... **xiv**
KATA PENGANTAR ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Telaah Pustaka 10
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 15
BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM **17**
A. Pengertian Pernikahan 17
B. Syarat Dan Rukun Perkawinan 21
C. Pengertian Nikah Siri 35

D. Dasar Hukum Pernikahan 37
E. Tujuan Pernikahan 41
F. Hikmah Pernikahan 44

BAB III PERKAWINAN DI ERA PANDEMI 47

A. Regulasi Perkawinan Di Era Pandemi 47
B. Praktik Perkawinan di Era Pandemi 59

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TEHADAP PERNIKAHAN SIRI ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 63

A. Analisis Terhadap Regulasi dan Praktik Perkawinan Yang di laksanakan di Era Pandemi Covid-19 63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Siri yang dilakukan secara Online di Era Pandemic Covid-19 75

BAB V PENUTUP 92

A. Kesimpulan 92
B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan bagian dari proses perkembangan manusia dalam kehidupannya yang merupakan sunnatullah yang disyari'atkan bagi manusia untuk melangsungkan hubungan rumah tangga secara resmi antara laki-laki dan perempuan untuk memperjelas keturunan. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik dan benar berdasarkan syariat, sehingga keabsahan perkawinan ikut andil dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.[1] Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh manusia yang sudah siap dan mampu untuk membentuk rumah tangga. Hal tersebut terdapat banyak dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Perkawinan harus disertai dengan rukun dan syaratnya menurut

[1] Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar: Alaudin Press, 2010).

[2] Tomy Michael, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Mimbar Keadilan* (jakarta, 2017), https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195.

para ulama'. Hal tersebut dipertegas dalam peraturan Undang-Undang di Negara Indonesia. Adapun rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qobul

Secara hukum perkawinan yang ditetapkan harus memenuhi rukun dan syarat, jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka status perkawinan tersebut tidak sah. Salah satu rukun perkawinan yaitu adanya kesepakatan dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang didalamnya mengandung penyerahan dan penerimaan sebagai bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak wali perempuan, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak mempelai laki-laki. Pengertian tersebut tidak hanya sebatas kontekstual saja, akan tetapi sudah menjadi syarat dan rukun dalam perkawinan. Kemudian yang tertulis dalam kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer ijab dan qabul merupakan janji suci yang tidak boleh disamakan dengan perjanjian pada umumnya. Karena adanya perjanjian yang kuat sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an *mitsaqon gholidzan* dimana perjanjian tersebut tidak hanya dilihat oleh dua orang saksi dan orang yang hadir dalam

keberlangsungan ijab dan qabul, namun juga disaksikan oleh Allah SWT.[3]

Pernikahan mempunyai beberapa syarat untk memenuhi keabsahan dalam suatu akad. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu* menerangkan bahwa dalam sighat akad ijab dan qabul ada empat macam yang disepakati oleh para Ulama:

1. Kesesuaian dan ketetapan kalimat ijab dengan qabul.
2. Wali yang mengucapkan ijab tidak boleh menarik ucapannya.
3. Diselesaikan pada waktu akad.
4. Dilakukan dalam satu majlis (ittihad al-majlis).

Mengenai ittihad majlis apabila kedua belah pihak hadir dalam majlis tersebut, jika wali dari mempelai perempuan mengatakan, "*Aku menikahkanmu dengan putriku*", kemudian apabila mempelai laki-laki berdiri atau berpaling dari majlis, dan baru mengatakan *"Aku menerima"*, maka status akad tersebut tidak sah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sekedar berdiri atau berpaling dari majlis dapat mengubah majlis. Demikian pula apabila pihak perempuan atau wali berdiri meninggalkan majlis sesudah ijab diucapkan dan dari pihak laki-laki mengucapkan qabul dalam satu majlis disaat

[3] Faizal Bachrong dan Fathur Marzuki dan Handar Subhandi Bakhtiar, "Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar" 7, no. 1 (2019): 49–62.

pihak perempuan tidak ada, maka status hukum akad tersebut juga tidak sah.[4]

Dalam kitab al-fiqh ala mazahib al-arba'ah karya dari Abdurrahman al-jaziri menerangkan bahwa Ulama mujtahid bersepakat mensyaratkan ijab dan qabul dalam satu majlis. Apabila salah satu diantara ijab dan qabul tidak dilakukan dalam satu majlis, maka ijab dan qabul tersebut tidak sah.[5] Syarat satu majlis tidak hanya untuk menjamin keterkaitan antara ijab dan qabul, namun keduanya sangat erat hubungannya dengan tupoksi kedua orang saksi, saksi harus melihat secara langsung bahwa ijab dan qabul benar-benar dilakukan oleh kedua mempelai. Dengan demikian, syarat sahnya suatu pernikahan harus dihadiri dua orang saksi. Peran dua orang saksi tersebut memastikan secara langsung dengan baik dan benar akan keabsahan ijab dan qabul mengenai kapastian ucapan ijab dan qabul dari kedua belah pihak.

Adanya Covid-19 sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah pelaksanaan pernikahan. Sejumlah peraturan baru sudah dibuat oleh pemerintah dan telah memunculkan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan pernikahan agar tetap bisa berjalan. Untuk mensiasati peraturan pemerintah adalah dengan melakukan akad nikah melalui *video call*. Kejadian tersebut menimbulkan

---

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu, Terjm. Abdul Hayyie Al-Kttani, Dkk*, ed. Gema Insani (jakarta, 2011).

[5] Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (jakarta: kencana, 2004).

perdebatan sejumlah kalangan baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan terkait keabsahannya.

Kemajuan teknologi yang semakin canggih membuat manusia mempunyai beberapa opsi dalam kehidupan sehari-harinya yang sangat membantu dalam berbagai hal. Seperti jual beli online, berinteraksi dengan sosial media, dan akhir-akhir ini ada praktik perkawinan yang dilakukan secara online melalui video call. Hal tersebut dilakukan tidak lain karena adanya pandemi Covid-19. Pernikahan melalui media komunikasi merupakan suatu cara yang tepat saat pandemi Covid-19 dengan tidak meninggalkan syariat yang sudah ditetapkan.

Kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pernikahan di saat pandemi Covid-19. Kemajuan tersebut memberikan solusi bagi keluarga yang mempunyai hajat dalam melangsungkan pernikahan. Pernikahan online juga terjadi di Indonesia salah satunya yang dilakukan oleh Max Walden dan Shaffira Gayatri. Mempelai pria berasal dari Australia dan mempelai perempuan berasal dari Surabaya Jawa Timur. Mereka sudah merencanakan pernikahan sejak akhir tahun 2019 dan memilih melaksanaka pernikahan pada tanggal 20 juni 2020. Saat virus corona mulai merabak, Max Walden dan Safira mlai berfikir realistis tentaang rencana pernikahan mereka dan sempat berniat menangguhkan sampai awal tahun depan, saat mendekati tanggal 20 Juni, keduanya kembali mendiskusikan kembali rencana pernikahan mereka, sakhirnya

sehari sebelum 20 juni setelah meminta pendapat dari beberapa ulama soal mekanisme pernikahan jarak jauh, Max dan Fira memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan mereka. Max semakin yakin dengan keputusannya setelah ia ingat presiden ke-4 Indonesia, KH Abdurrahman Wahid, atau Gusdur, juga melangsungkan akad nikah lewat sambungan telepon. Namun pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai adalah pernikaha menurut agama saja (siri), karena keterbatasan waktu untuk mengurus berbagai dokumen di masa pandemi.[6]

Berbicara mengenai keabsahan nikah onlie harus ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi dan tidak jauh dari makna *ittihad al-majlis*. Dalam pandangan ulama madzhab mengenai ittihad majlis ada yang menyangkutkan keharusan waktu antara ijab dan qabul bukan menyangkut kesatuan tempat, serta ada juga yang mengatakan ijab dan qabul menyangkut keharusan tempat dan berhadap hadapan[7].

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya kemudian dicatatkan menurut perundang-undangan yang

---

[6] Hellena Souisa, "Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia Tetap Menikah Lewat Zoom," ABCNEWS, 2020, https://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-01/pasangan-indonesia-dan-australia-menggelar-akad-nikah-lewat-zoom/12407008.

[7] Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, *Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*.

berlaku.[8] Peraturan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis, bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan dari dilangsungkannya perbuatan hukum yang berupa perkawinan. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang hukum perkawinan yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat[9]. Meskipun demikian, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan tetap dianggap sah menurut agama dan kepercayaan, namun dianggap tidak sah secara hukum. Konsekuensi yuridis tersebut menjadikan pernikahan tidak sah akibat tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Sedangkan dalam konteks hukum Islam perkawinan tersebut sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya.

Pada tanggal 19 Maret 2020 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Public di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama. Pada bagian ketentuan huruf E angka 1 huruf d, disebutkan: "Menunda kegiatan mengumpulkan massa seperti resepsi pernikahan dan acara keagamaan untuk

[8] Michael, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."
[9] Nation, "Kompilasi Hukum Islam," *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2001): 2176–81.

menghindari kerumunan"[10]. Kemudian pada tanggal 2 April 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama kembali mengeluarkan Surat Edaran nomor: P-003/DJ.III/Hk.007/04/2020 tentang perubahan atas surat edaran direktur jenderal nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020. Pada bagian ketentuan huruf E angka 3 point a angka 7 disebutkan : "Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan"[11].

Ijab dan qabul melalui video call dalam praktiknya yang dilakukan antara wali nikah dengan calon mempelai pria tidak dapat dilakukan meskipun saat pandemic karena sudah ada surat edaran dari Kementrian Agama yang menyatakan bahwa pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan. Sebab cara semacam itu masih menimbulkan ketidakpastian hukum atau kesamaran. Ketidakpastian ini disebabkan atas sejumlah ketentuan dan persoalan yaitu:

1. Nikah adalah perkara ibadah
2. Persyaratan *al-mu'ayyanah*

[10] Kementrian Agama RI, "Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020," *Kementrian Agama* (Jakarta, 2020).

[11] Kementrian Agama RI, "Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Perubahan SE No.P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020" (Jkarta, 2020).

3. Peluang manipulasi
4. Ketimpangan konektivitas
5. Terdapat ketentuan dari pemerintah yang memiliki derajat seperti *qanun*[12]

Jika melihat kasus diatas dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama, kasus dan peraturan tersebut sangat bertolak belakang, terlebih masalah *ittihad al-majlis* ada madzhab yang mengharuskan satu tempat dan berhadap-hadapan ada juga yang berpendapat *ittihad al-majlis* adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu (zaman) antara ijab dan qobul, bukan menyangkut kesatuan tempat (makan). Kemudian mengenai nikah siri adalah sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara karena tidak dicatatkan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti sebuah skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Siri Online**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana regulasi dan praktik perkawinan siri oline yang dilakukan di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkawinan siri online yang dilakukan di masa pandemi covid-19?

---

[12] Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 68, https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pernikahan siri yang dilaksanakan secara online di masa pandemic covid-19 menurut hukum Islam dan regulasi menurut hukum positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

   Secacra teoritis skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya berkaitan dengan pokok masalah penelitian yaitu akad nikah yang dilakukan secara online menurut hukum Islam di Indonesia. Dan dapat memberikan manfaat tentang wacana baru dalam kajian hukum perkawinan Islam.

2. Kegunaan praktis

   Kegunaan praktis skripsi ini yaitu sebagai syarat mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

   Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penjelasan mengenai akad nikah yang dilakukan secara online dan kedudukan hukumnya menurut hukum perkawinan Islam.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Fina Mufidah jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN SALATIGA tahun 2020 yang berjudul Peanangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqosid Syariah (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang). Pada penelitian ini focus pada pelaksanaan perkawinan berdasarkan maqosid syariah, sedangkan yang saya teliti focus pada Hukum Islam.[13]

Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika Putera Emas Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2020 yang berjudul Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaran walimah selama masa pandemic covid-19. Pada penelitian ini focus kepada cara penyelesaian masalah penyelenggaraan walimah dimasa pandemic sedangkan yang saya teliti focus kepada hukum islam mengenai nikah online itu sendiri.[14]

Penelitian yang dilakukan oleh Fatah Zukhrufi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Tahun 2012 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Akad Nikah Via Net Meeting (Studi atas pemikiran hukum islam K.H.M.A. Sahal Mahfud) peneliti menitikberatkan terhadap pemikiran K.H

[13] Fina Mufidah, "Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'Ah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 1689–99, http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/10302/1/FINA MUFIDAH-1.pdf.

[14] Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19."

Sahal Mahfud mengenai akad nikah yang dilakukan melalui Net Meeting.[15]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian pustaka (library research)[16], yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah akad nikah melalui media masa, telekonferensi dan yang sejenis dengannya dan beberapa literature tentang akad nikah yang dilakukan secara online dari perspektif hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

   Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normative (Hukum Islam). Pendekatan teologi normative adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah Hukum Islam. Dan penelitian ini juga melihat pada segi-segi

---

[15] Fatah Zukhrufi, "Tinjauan Hukum Islam Akad Nikah Via Net Meeting (Studi atas pemikiran hukum islam K.H.M.A. Sahal Mahfud)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012)

[16] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (jakarta: bumi aksara, 2008).

yuridis normative pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari literature-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab salah satunya adalah kitab karya Wahhab Az-Zuhaili *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, buku bacaan salah satunya yang berjudul Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah karya Satria Effendi, sumber bacaan media sosial salah satunya CNN INDONESIA, maupun sumber bacaan lainnya.

4. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum utama yang dapat memberikan keterangan secara langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian yang berupa hukum Islam (syara') dan kejadian didalam ruang lingkup masyarakat.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum tambahan yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Sumber hukum bisa berupa undang-undang, buku-buku, artikel dari media masa, dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data
    a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian yaitu Pernikahan yang dilaksanakan secara online.
    b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam pembahasan suatu masalah. Dalam proses ini kutipan yang memang jelas akan dipertahankan sesuai aslinya namun bila kurang jelas atau justru menimbulkan pengertian lain, maka data tersebut akan diseleminasi dan digantikan dengan rujukan lain yang lebih sesuai dengan pembahasan.
    c. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapat data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.
6. Teknik Analisis Data

    Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh.

Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan kata-kata yang berasal dari literature bacaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar maka skripsi ini disusun dalam sistematika yang terdiri dari lima Bab yaitu:

Bab I, pendahuluan yang berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori tentang pernikahan yang meliputi: pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, pengertian nikah siri, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, dan hikmah pernikahan.

Bab III, perkawinan di masa pandemi yang meliputi: regulasi perkawinan di era pandemi, praktik perkawinan di era pandemi.

Bab IV, analisis hukum Islam terhadap pernikahan siri online di masa pandemi covid-19 yang meliputi: Analisis Terhadap Regulasi dan Praktik Perkawinan siri Yang dilakukan secara online di masa Pandemi Covid-19, Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan siri yang dilakukan secaraonline di masa Pandemi Covid-19.

Bab V, penutup yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin[1]. Seperti dalam firman Allah.

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya[2]."

Demikian pula za-wa-ja dalam al-Qur'an mengandung arti kawin, terdapat dalam firman Allah sebagai berikut.

[1] KN Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dakam Islam* (Malang: Setara Press, 2018).

[2] Al-Qur'an, *Surat An-Nisa Ayat 3*, n.d.

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُۗ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۤىِٕهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًاۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat merek, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketatapan Allah itu pasti terjadi.[3]"

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin", yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin attau bersetubuh). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal

[3] Al-Qur'an, *Surat Al-Azhab Ayat 37*, n.d.

dari kata “nikah” yang berarti *al-jam’u* dan *al-dhamu*, yang artinya kumpul atau mengumpulkan, slaing memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh (*wat’i*). kata “nikah” sering digunakan (*wat’u al-zaujah*) untuk persetubuhan. Selain itu juga (zawaj) untuk arti aqdu al-tazwij atau akad nikah. Secara terminology, nikah adalah akad yang diteapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Akad yang memberikan faedah hukum dibolehkannyamengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita serta mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Perkawinnan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, didalamnya terkandung tujuan mengharapkan ridha Allah SWT.[4]

Undang- Undang No.1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

[4] Mahmudin Bunyamin Agus and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Ada beberapa hal dalam rumusan tersebut yang perlu dipperhatikan, yaitu:

a. Digunakan kata: "seorang pria dan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
b. Digunakan ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".
c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.
d. Disebutkannya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.[6]

Disamping definisi yang diberikan oleh Undang- Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

[5] Michael, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."
[6] KN Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dakam Islam*.

memberikan definisi lain yang bersifat menambah penjelasan, yaitu:

"Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[7]

B. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Unsur pokok suatu perkawinan adalah adanya laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang akan melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.[8]

Dalam Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa: "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun"[9]. Undang-Undang ini diperkuat dalam KHI yang substansinya sama bahwa: "pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan"[10]. Namun, pemerintah resmi mengesahkan UU No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dengan perempuan yang akan menikah

[7] Nation, "Kompilasi Hukum Islam."
[8] KN Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dakam Islam*.
[9] Michael, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."
[10] Nation, "Kompilasi Hukum Islam."

minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.[11]

Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan syarat dan rukun terdapat perbedaan pendapat dikalagan ulama. Akan tetapi, semua ulama sependapat bahwa yang harus ada dalam perkawinan antara lain: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin. Dalam UU Perkaiwinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat perkawinan yang berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membahas rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh syafi'I dengan dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk didalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu atau takbiratul ihram untuk shalat[12], atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Adapun rukun nikah yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan

[11] Peraturan Pemerintah et al., "Undang-Undang No.16 Tahun 2019," no. 42 (2019).

[12] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (jakarta: Bulan Bintang, 1976).

3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shighat ijab qabul

Adapun penjelasan mengenai syarat dan rukun perkawinan sebagai berikut:

a. Akad (ijab qabul)

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Menurut ketentuan peraturan pemetintah yaitu: "Perkawinann dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah".[13] Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukakn menurut ketentuan huukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Menggunakan kata-kata: nikah atau tazwid atau terjemahan dari kata-kata nikah atau tazwid

[13] Sekretariat Negara Republik Indonesia, "PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan," 1975, 22.

4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dua orang saksi.[14]

Undang –Undang Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan, bahkan tidak membicarakan akad perkawinan, yaitu dalam pasal berikut:

"Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun tidak terselang waktu."[15]

"Akad nikah dilangsungkan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain."[16]

1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang secara tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

[14] Agus and Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*.
[15] Michael, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."
[16] Michael.

3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.[17]

Syarat ijab dan qabul menurut pendapat para madzhab, datang dari madzhab imamiyah, Syafi'iyah dan Hanabila mereka berpendapat bahwa disyaratkan untuk kesegeraan di dalam akad, yang artinya qabul harus dilakukan langsung atau segera setelah ijab dan tidak terpisah (oleh perkataan lain). Kemudian madzhab Maliki berpendapat, pemisahan yang sekedarnya, maksudnya di dalam ijab qabul setelah terjadinya ijab tidak langsung dijawab dengan qabul tapi di isi/dipisahkan, misalnya khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya,menurut madzhab ini tidak apa[18].

Sedangkan madzhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan, Hanafi membolehkan ada jarak anatara ijab dan qabul, menurut pendapat madzhab ini, kalua ada seorang laki-laki yang mengirim surat lamaran kepada seorang wanita lalu wanita tersebut menghadirkannnya para saksi dan membacakannya kepada mereka, kemudian mengatakan "saya nikahkan diri saya kepadanya", padahal laki-laki yang melamarnya tidak ada di sana, maka akad tersebut sah.[19]

---

[17] Michael.

[18] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (jakarta: Lentera, 2011).

[19] Mughniyah.

b. Syarat Laki-laki dan Perempuan yang Kawin

Syarat-syarat mempelai laki-laki:

1. Beragama Islam
2. Bukan mahram dari calon istri
3. Tidak terpaksa atau dipaksa
4. Tidak dalam keadaan ihram haji/ umroh
5. Tidak memiliki 4 istri

Syarat-syarat mempelai perempuan:

1. Beragama Islam
2. Tidak dalam masa iddah
3. Tidak bersuami
4. Tidak sedang ihram haji/umroh
5. Bukan wanita musyrik[20]

Syarat syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin[21]:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adapun syariat peminangan yang terdapat dalam AL-Quran dan hadis Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka,

[20] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).
[21] KN Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dakam Islam*.

2. Keduanya sama-sama beragama Islam.
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
5. Keduanya telah mencapai usia yang lebih layak untuk melangsungkan perkawinan.

c. Wali dalam Perkawinan

Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesui dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[22]

"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya." Apabila tidak dipenuhi, status perkawinannya tidak sah.[23]

Undang –undang Perkawinan tidak menyebutkan adanya wali dalam perkawinan, tetapi Undang-undang perkawinan menyinggung adanya wali nikah dalam pembatalan perkawinan:

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014).

[23] Nation, "Kompilasi Hukum Islam."

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sahh atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dlaam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami dan isteri.[24]

Syarat-syarat wali:

1. Islam
2. Laki-laki
3. Baligh
4. Waras akalnya
5. Tidak dipaksa/terpaksa
6. Adil dan
7. Tidak sedang ihram

Dalam hal perwalian ini terdapat perbedaan diantara beberapa madzhab, yang pertama datang dari madzhab syafi'I bahwa menurut ini wali merupakan syarat sah nya suatu pernikahan, yang mana madzhab ini berlandaskan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Tirmidzi berasal dari Aisyah Radhiyallahuanha (istri Rasulullah) yang berbunyi: "Barang siapa seorang

[24] Michael, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

perempuan yang menikah dengan tidak seizing walinya maka nikahnya tidak sah".[25]

Namun lain halnya dengan madzhab Hanafi, menurutnya nikah (pernikahan) itu tidak termasuk kedalam syarat harus adanya wali, karena bagi pendapat madzhab ini mereka mengatakan bahwa akibat dari ijab (penawaran) akad nikah yang diucapkan oleh seorang wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Jusuf, Imam Malik dan riwayat Ibnu Qashim, alasan mereka ini dilandasi oleh Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 230 dan 232 yang berisikan tentang seorang suami yang menalak iserinya dan apabila ia ingin kembali maka mereka harus menikah dengan yang lainnya, dan apabila mereka telah habis masa tenggang (*iddahnya*) jika mereka ingin kembali maka tidak ada hak walinya untuk melarang. Adapun beberapa alasan wanita berwalikan hakim yaitu:[26]

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat wali bagi yang lebih dekat dan wali yang lebih jauh tidak ada
3. Wali yang lebih dekat ghaib sejauh perjalanan safar yang memperbolehkan wasar sholat
4. Wali yang lebih dekat sedang melakukan ihram atau sedang malaksanakan umrah ataupun haji

[25] Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).
[26] Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978).

5. Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai
6. Wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan
7. Wali yang lebih dekat menghilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Penjelasan tentang wali secara lengkap dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan keseluruhannya mengikuti fiqg Madzhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyyah.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannyaa.[27]

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b.Wali hakim.[28]

(1)Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya; b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka; c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni

[27] Nation, "Kompilasi Hukum Islam."
[28] Nation.

saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2)apabila dalam satu kelompok wlai nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memnuhi syarat-syarat wali.[29]

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.[30]

(1) Wali hakim berarti dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menhadirakannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;

[29] Nation.
[30] Nation.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut[31].

Berdasarkan pasal-pasal yang sudah disebutkan dalam kompilasi Hukum Islam tersebut sudah sangat jelas terkait hal-ha apa saja yang menjadi rukun dan syarat wali dalam perkawinan.

d. Saksi

"Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.[32]" Dengan demikian, kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak sah. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa:

"Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tudak berwenang, wali nikah tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dpaat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suammi isteri, jaksa dan suami isteri.[33]"

---

[31] Nation.
[32] Nation.
[33] Michael, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Dasar hukum mengaharuskan saksi dalam perkawinan adalah hadis Nabi dari Al-Daruqutny meriwayatkan dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

لَا نِكَاح إِلَّا ولِي وشاهدي عدل

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

Syarat-syarat saksi menurut madzhab Syafi’I adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki
2. Beragama islam
3. Baligh
4. Waras akalnya
5. Adil
6. Dapat mendengar dan melihat
7. Tidak dipaksa
8. Tidak sedang ihram
9. Memahami Bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul

Tetapi menurut golongan madzhab Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, dan menurut Hanafi boleh dua orang buta

dan dua orang fasik (tidak adil) sedangkan orang tidur orang tuli dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.[34]

Syarat-syaarat saksi terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.[35]"

e. Mahar

Mahar berasal dari Bahasa arab mahr atau maskawin adalah sejumlah uang atua barang yang diberikan atau dijanjikan secara tegas oleh seorang calon suami kepada calon isterinya pada saat mengucapkan akad nikah. Para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma'.

Firman Allah dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengansenang hati,

[34] Ghozali, *Fiqih Munakahat*.
[35] Nation, "Kompilasi Hukum Islam."

maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."[36]

Dalam UU Perkawianan Nomor 1 tahun 1974 tidak disebutkan adanya mahar, tetapi KHI mengaturnya dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38. Adapun dalam pasal 30 KHI dinyatakan, "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan sejenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."[37]

Pasal selanjutya juga penting diperhatikan yang menyatakan:

"penentuan mahar berdasarkan atas asa kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam,"[38]

C. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri adalah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum/ terbuka, biasanya nikah siri dilakukang dalam kalangan terbatas dihadapan kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas KUA sehingga tidak mendapatkan surat nikah yang resmi. Kemudian dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Peratusan ini menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan berarti perkawinan tersebut tidak sah. Dengan demikian pernikahan yang dilakukan secara siri

[36] Al-Qur'an, *Surat An-Nisa Ayat 4*, n.d.
[37] Nation, "Kompilasi Hukum Islam."
[38] Nation.

dianggap tidak sah menurut hukum positif karena tidak dicatatkan dan diakui oleh Negara.

Dalam fikih kontemporer nikah siri dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikaahan tetappi tidak tercatat resmi oleh pegawai pemerintah (KUA). Disebut nikah 'urfi (adat) karena pernikahan ini merupakn adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat mslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad nikah mereka tanpa ada permaasalahan dalam hati mereka. Pernikahan siri dapat disahkan dengan dua cara yakni mengajukan isbath nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang.

Hukum nikah siri secara Agama adalah sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Pada prinsipnya, selama nikah siri memenuhi rukun dan syarat yang disepakati oleh ulama' maka dapat dipastikan bahwa nikah tersebut adalah sah. Pendaoat ulama Islam adalah sebagai berikut:

1. Menurut Madzhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah nikah siri.
2. Menurut madzhab Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi utuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikaha tersebut adalah batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah siri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan

tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya, jika penyembunyian itu khawatir dari orang zalim atau semisalnya maka hukumnya wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.

3. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah siri adalah yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Beliau berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.
4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, disisi lain nikah yang tidak dicatatkan selama ada dua orang saksi tetap sah menurut hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena sudah melanggar ketentuan yangditetapkan pemerintah.[39]

D. Dasar Hukum Pernikahan

a. Dasar Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Firman Allah

[39] Paraga Sukardi, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)," *Jurnal Pendais* 1, no. 2 (2019): 144–51, file:///C:/Users/Asus/Downloads/617-Article Text-1960-1-10-20200319.pdf.

SWT yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan adalah:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."[40]

Adapun hadis yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud muttafaq alaih:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai kaum muda! Barang siapa yang mempunyai kemampuan dari segi "al-baah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan: Apabila ia

[40] Al-Qur'an, *Surat Ar-Rum Ayat 21*, n.d.

tidak mampu untuk kawin hendaklah ia puasa itu baginya pengekang hawa nafsu."[41]

b. Hukum Perkawinan

Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinna terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah Sunnah. Golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunna untuk sebagian orang lainnya dan mubah. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesulitan dirinya.

Secara terperinci hukum pernikahan adalah sebaagai berikut:

1. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisikal), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Hal ini disebabkan menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.

Sebagai petunjuk dalam firman Allah SWT:

[41] Kitab Nikah, *Kitab Nikah BAB 1 Tentang Nikah Hadis Ke-780*, n.d.

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

"Dan orang—orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.[42]*"*

2. Sunnah (Mustahab atau dianjurkan)

   Pernikahan tidak menjadi wajib tetapi sangat dianjurkan atau (di-*sunnah*-kan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik maupun finansial); walaupun merasa yakin akan kemampuan nya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerusms dalam perbuataan yang diharamkan Allah.

3. Haram

   Pernikahan menjadi haram bagi yang mengetahui dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah (yang bersifat fiannsial) maupun nafkah batiniah (kemampuan melakukan hubungan seksual) yang wajib diberikan kepada istri.

4. Makruh

   Pernikahan menajdi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang tidak

[42] Al-Qur'an, *Surat An-Nur Ayat 33*, n.d.

membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat lahiriah maupun maupun yang tidak memiliki (kemampuan) hasrat seksual, sementara perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidak mampuan calon suami.

5. Mubah

   Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.[43]

E. Tujuan Pernikahan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai nalurinya yang perlu mendapat pemenuhan, tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang humoris, sejahtera, dan bahagia. Mengenai naluri manusia yang telah disebutkan itu dijelaskan dlaam surat Ali-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚوَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

[43] Agus and Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*.

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu: wanita, anak-anak dan harta yang banyak."[44]

Ayat diatas menjelaskan tentang manusia yang memiliki kecenderungan terhadap wanita, anak , dan juga harta benda. Imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, tujuannya yaitu ada 5[45]:

1. Meningkatkan Ibadah Kepada Allah SWT

   Dalam pernikahan salah satu tujuan yang paling utama ialah beribadah kepada Allah SWT, karena pernikahan merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan, dengan menikah suami maupun istri bisa lebih taat dalam beribadah kepada Allah SWT.

2. Memperoleh Keturunan

   Tujuan dari pernikahan tak pernah lepas dari yang namanya keturunan, karena Islam menghalalkan hubungan bagi suami istri untuk memperbanyak keturunan sehingga tidak terputusnya nasab.

3. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi

   Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena nikah merupakan fitrah dan naluri kemanusiaan. Jika naluri tersebut tidak terpenuhi melalui jalan yang benar

[44] Al-Qur'an, *Surat Ali Imran Ayat 14*, n.d.
[45] Ghozali, *Fiqih Munakahat*.

yaitu melalui pernikahan, maka akan menjerumuskan seseorang ke jalan yang salah yaitu mereka dapat berbuat hal-hal yang diharamkan Allah seperti berzina, kumpul kebo, dan lain sebagainya

4. Sebagai benteng bagi akhlak manusia

   Dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'I, Drimi, Ibnu Jarud, dan Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya: *"Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya."*

   Jadi dengan jalan adanya pernikahan menjadikan benteng bagi manusia untuk berbuat yang tidak baik, serta dalam hal ini pernikahan juga mampu menjadikan manusia tersebut lebih bermartabat.

5. Membangun rumah tangga yang sesuai dengan Agama Islam

   Salah satu tujuan dari pernikahan ialah membina rumah tangga bersama sesuai dengan agama Islam, Islam membenarkan perceraian jika mereka tidak menjalankan pernikahan sesuai aturan agama Islam dan Islam juga membenarkan rujuk jikan

mereka ingin kembali memperbaiki hubungan mereka.

F. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dikarenakan beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh mereka yang bersangkutan secara individual, masyarakat secara umum, serta kumpulan manusia secara menyeluruh[46]. Menurut Ali Hmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan itu banyak, berikut hiikmah dianjurkannya pernikahan:

1. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung. Naluri ini mengarahkan manusia untuk dapat menyalurkannya. Karena apabila naluri tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi hal buruk yang tidak diinginkan, atau terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Dengan adanya pernikahan manusia dapat menyalurkan naluri seksualnya terhadap pasangannnya, menjauhkan manusia dari perasaan resah gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.
2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini tergambar dalam firman Allah SWT surah Ar-Rum ayat 21:

[46] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009).

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

3. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, banyak manfaat yang diperoleh dengan banyak nya keturunan, menjaga terlangsungnya hidup, serta mengindari keputusan nasab, karena Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya[47]. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 1

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, daripadanya Allah menjadikan istri-istri dan dari

[47] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (jakarta: kencana, 2003).

keduanya Allah menjadikan anak keturuunan yang banyak, laki-laki dan perempuan".[48]

4. Tuntutan tanggung jawab antar suami istri didalam pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga, serta dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha untuk mengembangkan kreatifitasnya. Suami akan bekerja keras untuk menafkahi istrinya dan istrinya belajar untuk dapat mengerti keadaan mereka.
5. Pernikahan menyatukan kedua keluarga, menumbuhkan jalinan kasih sayang sesame mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat.

Jadi secara singkat dapat dipahami bahwa tujuan dan hikmah dari pernikahan itu adalah menyalurkan naluri seks, penyaluran naluri keibuan dan kebapakan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin tali silaturrahim antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan.

[48] Al-Qur'an, *Surat An- Nisa Ayat 1*, n.d.

BAB III

PERKAWINAN DI ERA PANDEMI

A. Regulasi Perkawinan Di Era Pandemi

Nikah online merupakan suatu bentuk pernikahan yang ijab dan qabulnya dilakukan melalui jaringan atau 2 sistem internet, jadi antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan berjauhan tempatnya. Nikah online dalam pengertian umum adalah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dilakukan dengan bantuan komputer/ video call di due tempat yang berbeda, yang masing-masingnyya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantunya. Media online sendiri adalah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), di dalamnya terdapat portal, website (situs web), radio online, tv online dan lain-lain dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang bersumber pada jaringan internet.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya kemudian dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis, bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan dari dilangsungkannya perbuatan hukum yang berupa perkawinan. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang hukum perkawinan yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan

bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Meskipun demikian, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan tetap dianggap sah menurut agama dan kepercayaan, namun dianggap tidak sah secara hukum. Konsekuensi yuridis tersebut menjadikan pernikahan tidak sah akibat tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Sedangkan dalam konteks hukum Islam perkawinan tersebut sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya.

Adanya pandemi Covid-19 membuat aktivitas manusia terhambat salah satunya dalam penyelenggaraan perkawinan. Adanya peraturan dari pemerintah yang telah ditetapkan, mengakibatkan kebiasaan hidup baru dalam penyesuaian acara perkawinan agar tetap berjalan. Salah satunya adalah melakukan akad nikah via online. Terjadinya kebiasaan baru tersebut memunculkan sebuah pro dan kontra dikalangan masyarakat maupun cendekiawan mengenai keabsahannya.

Wahbah Az-Zuhaili menerangkan karyanya dalam kitab fiqh Islam Wa-Adillatuhu bahwa menurut kesepakatan para ulama, dalam akad ijab dan qabul disyaratkan empat hal:[1]

1. Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dan qabul

   Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika ijab dan qabul berbeda, dan perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah perempuan

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu, Terjm. Abdul Hayyie Al-Kttani, Dkk.*

berkata, “Aku menikahkanmu denggan Khadijah,” lantas si lelaki menjawab, “Aku menerima pernikahan Fatimah,” mkaa pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat qabul berbeda dnegan apa yang disebutkan dalam kalimat ijab. Jika perbedaan itu terletak pada ukuran mahar, misalnya saja si wali perempuan berkata, “Aku nikahkan kamu dengan puteriku dengan mahar 1000 dirham,” lantas si lelaki menjawab, “Saya terima nikahnya dnegan mahar 800 dirham,” maka pernikahannya tidak sah. Sebab tidak sahnya akad karena ada perbedaan dalam ukuran mahar, sekalipun mahar bukan merupakan rukun akad adalah bahwa sesungguhnya jika mahar disebutkan di dalam akad maka ia menjadi bagian dari kalimat ijab.

2. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.

   Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ijabnya menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat qabul. Karena ijab dan qabul merupakan rukun. Dengan kata lain, salah satu dari keduanya hanya merupakan setengah rukun saja.

3. Diselesaikan pada waktu akad.

   Di dalam fiqih empat madzhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan diwaktu yang akan datang, misalnya dengan berkata “Aku akan menikahimu

besok, atau lusa". Juga tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, "Aku akkan menikahimu jika Zaid datang". Atau jika ayah meridhai, atau berkata, "Aku akan menikahkanmu dengan puteriku jika matahari telah terbit". Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau pengggantian.

Disamping itu, telah dijelaskan dalam KHI Pasal 27, yakni: "ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak terselang waktu".

4. Dilaksankaan dalam satu majelis (ittihad al-majlis)

   Dilakukan dalam satu majlis (ittihad al-mmajlis) jika kedua belah pihak hadir. Jika pihak perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan diriku", lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata qabul, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari majelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, "Aku menerima", maka akad tersebut tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majlis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkan majlis setelah mengucapkan kalimat ijab, lantas pihak kedua mengucapkan kata qabul di dalam majlis disaat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga dianggap tidak sah.[2]

Menurut Ulama Madzhab Syafi'iyah, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya

[2] Wahbah Az-Zuhaili.

kesinambungan (*muttasil*) antara ijab dan qabul. Oleh karena itu, dalam madzhab yang memegang teguh pada Imam Syafi'I ini, pengucapan ijab dan qabul dalam satu tempat (*makan*) dan kurun waktu (*zaman)* yang sama adalah suatu keharusan. Hal ini berarti esensi dari persyaratan akad ittihad al-majlis adalah menyangkut kesatuan tempat (*makan*), bukan semata-mata kesatuan ucapan (*kalam*) dari kedua belah pihak. Beranjak dari pemahaman inilah ulama Syafi'iyah menolak dan menganggap tidak sah suatu akad (*ijab dan qabul*) dengan media tulisan (*al-kitabah*) yang dilakukan melalui surat, selain melalui perwakilan. Hal ini didasarkan pada disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, qabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah oleh perkataan lain. Alasan yang juga ikut mencuat adalah karena ijab dan qabul harus dilakukan dengan lafadz yang sharih, sedang suatu ucapan termuat dalam redaksi sebuah surat (*kitabah*) dianggap tidak jelas atau samar (*kinayah*). Sementara persoalan akad nikah tidak diperkenankan dengan sesuatu yang masih semaratau tidak jelas (*kinayah*).[3]

Sedangkan ulama Hanafi menginterprestasikan tentang ittihad al-majlis bersatu majlis pada sebuah akad dalam pernikahan adalah menyangkut kesinambungan waktu (*zaman*) diantara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena ijab dan qabul pada konteks ini harus dilaksanakan

[3] Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i, Biografi Dan Pemikiran Madzhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa, Terjemah Dari Al-Imam Al-Syafi'i Fi Madzhabihi Al-Qadim* (jakarta: Hikmah, 2008).

dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu ritual akad nikah, bukan dilaksanakan pada dua kurun waktu yang terpisah, dalam artian bahwa ijab diikrarkan dalam satu ritual, lalu setelah ritual ijab bubar, qabul di ucapkan pada acara selanjutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir tadi, meski dua acara berkesinambungan secara terpisah bisa jadi dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama, akan tetapi dikarenakan kesinambungan antara ijab dan qabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah.[4]

Kemudian terkait syarat ijab dan qabul, diatur pada pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu." Lalu diatur dalam pasal 29 ayat (1)-(3), bahwa:

(1) Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria
(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mmempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.[5]

[4] Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*.
[5] Nation, "Kompilasi Hukum Islam."

Pada tanggal 19 Maret 2020 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Pada nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Public di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama bagian ketentuan angka 3 tentang protocol pencegahan penyebaran covid-19 pada layanan nikah di KUA disebutkan:

a. Pencegahan penyebaran covid-19 pada pelayanan akad nikah di KUA:
    1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
    2. Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker; dan
    3. Petugas, wali nikah dan catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab Kabul;
b. Pencegahan penyebaran covid-19 pada pelayanan akad nikah di luar KUA:
    1. Ruangan prosesi akad nikah di tempat terbuka atau di ruangan yang berventilasi sehat;
    2. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang;
    3. Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker; dan

4. Petugas, wali nikah dan catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab Kabul.

c. Untuk sementara waktu meniadakan semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA, yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat 0serta menciptakan perkawinan, bimbingan klasikal dan sebagainya; dan
d. Selalu melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk memberi rujukan yang diperlukan bilamana terdapat tanda-tanda dan gejala sakit baik pada petugas maupun masyarakat pada saat pelayanan berlangsung.[6]

Dengan adanya surat edaran tersebut pemerintah sudah sangat menghimbau adanya kewaspadaan bagi masyarakat seluruh Indonesia serta menjaga kesehatan dan menaati protocol kesehatan.

Pada tanggal 2 April 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama kembali mengeluarkan Surat Edaran nomor: P-003/DJ.III/Hk.007/04/2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang pelaksanaan protocol penanganan Covid-19 pada area public di lingkungan

[6] Kementrian Agama RI, "Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020."

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pada bagian ketentuan huruf E angka 3 disebutkan:

a. Point a diubah menjadi:
   Pencegahan penyebaran Covid-19 pada layanan KUA
   1. Pendaftaran nikah tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenag.go.id;
   2. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa dadrurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya;
   3. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020;
   4. Pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA;
   5. Tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilakasanakan secara daring (online);
   6. Memberitahukan kepada masyarakat nomor kontak atau email petugas layanan KUA agar pelaksanaan pelayanan secara daring dapat terlaksana dengan optimal; dan
   7. Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnnya tidak diperkenankan.
b. Point b diubah menjadi:
   Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di KUA:

1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang dalam satu ruangan;
2. Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti akad nikah harus telah membasuh tangan dengan sabun/ handsanitizer dan menggunakan masker; dan
3. Petugas, Wali Nikah dan Calon Pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab Kabul.

c. Point e (baru)

Petugas layanan melaksanakan dengan sungguh-sungguh hal berikut:

1. Memastikan protocol pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelayanan dipatuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kedisiplinan , serta menolak pelayanan yang tidak sesuai protocol sebagai bentuk kesungguhan dalam penerapannya;
2. Menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan layanan serta menunda permintaan pelayananyang membutuhkan tatap muka secara langsung; dan
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan apparat pemerintah daerah beserta pihak keamanan untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap tingggal dirumah, menjaga jarak aman (*physical/ social distancing*), menghindari kerumunan, menunda resepsi dan pernikahan.

d. Point f (baru)

Memahami bahwa tingkat kedaruratan ditiap daerah berbeda, KUA wajib meningkatkan koordinasi, mematuhi serta menyelaraskan penyelenggaraan layanan masyarakat sesuai dengan perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan Covid-19 di wilayahnya.[7]

Dengan adanya perubahan dari surat edaran tersebut maka sudah jelas bahwa KUA tidak melakukan pelaksanaan perkawinan selama masa darurat Covid-19 kecuali yang sudah mendaftarkan pernikahan sebelum tanggal 01 April 2020. Pendaftaran tetap dapat dilakukan tetapi secara online melalui web simkah.kemenag.go.id. dengan adanya surat edaran ini, maka secara tidak langsung akan banyak sekali warga yang menunda pernikahan mereka dan itu memang ditujukan untuk menunda penyebaran Covid-19 ini. Akan tetapi dari hal tersebut pasti banyak sekali mudarat yang akan terjadi salah satunya yaitu adanya nikah siri dengan alasan pemerintah yang tidak melayani akad nikah.

Kemudian lahir Surat Edaran Pada tanggal 23 April 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama kembali mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-004/DJ.III/Hk.007/04/2020 yang berbunyi:

[7] Kementrian Agama RI, "Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Perubahan SE No.P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020."

1. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
2. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April;
3. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
4. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protocol kesehatan dapat berjalan dnegan sebaik-baiknya;
5. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang calon pengantin dalam satu hari;
6. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menangguhkan pelaksanaan akad nikah di hari lain;
7. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga Catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1,3, dan/atau 6, kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah diluar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai

oleh salah diajukan seorang Catin dengan disertai alasan yang kuat;

8. Dalam hal protocol kesehatan tidak dipenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan yang kuat;
9. KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19; dan
10. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan apparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.[8]

Dengan adanya surat edaran ini dapat diperhatikan bahwa pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020 dan permohonan nikah setelah itu tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Maka dari itu ada banyak pasangan calon pengantin yang harus rela menunda pernikahan bahkan tidak melakukan pernikahan tanpa pesta karena hal itu tidak diperkenankan.

B. Praktik Perkawinan di Era Pandemi

Dikutip dari REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA: Riset dari lembaga riset populix menunjukkan bahwa pandemic

[8] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020," 2020.

COVID-19 mendorong adanya tren baru di acara pernikahan saat ini. Tren pernikahan saat pandemic umumnya lebih intim dan akrab dengan penggunaan teknologi. COO Populix Eileen Kamtawijoyo mengatakan, situasi serta kebijakan pemerintah dalam hal pembatasan kerumunan berdampak pada berbagai penyesuaian di masyarakat. Di Indonesia sendiri, menggelar pesta pernikahan dengan mengadakan serangkaian acara adat serta mengundang banyak tamu merupakan sebuah budaya. Budaya menggelar resepsi kini tak lagi menjadi pilihan. Hasil riset menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 36 persen memilih untuk hanya menggelar acara akad nikah tanpa menggelar resepsi. Sementara hanya sebagian kecil saja (14 persen) yang memilih untuk tetap menggelar acara akad nikah dan resepsi di masa pandemic. Menariknya, meski telah beradaptasi dalam hal bentuk pelaksanaan acara, jumlah responden yang berencana mengundang tamu diatas 150 orang jumlahnya cukup tinggi yaitu 30 persen dari total responden. Dan hanya 8 persen yang berencana mengundang dibawah 50 tamu undangan. “Hal ini menunjukkan bahwa ikatan kekeluargaan di Indonesia sangat kuat sehingga terasa sangat sulit bagi masyarakat untuk hanya mengundang sedikit orang”, papar Eileen. Pesatnya perkembangan teknologi di masa pandemic turut berperan dalam menghadirkan berbagai aspek baru dalam pernikahan menjadi digital. Seperti munculnya undangan digital (e-invitation), pemberian angpao melalui QR Code, bahkan mengubah konsep pernikahan menjadi virtual wedding, kata Eileen. Hasil survei populix menyebutkan bahwa

42 persen dari total responden mengaku pernah mengahdiri pernikahan teman atau keluarga secara viertual selama pandemic. Namun, meski sedang berada di tengah kondisi yang tidak menentu dan membuat khawatir bagi sebagian banyak orang, ternyata keinginan masyarakat untuk menghadiri acara pernikahan secara langsung masih tinggi. Mayoritas responden (73 persen) pernah menghadiri pernikahan teman atau keluarga secara tatap muka selama pandemic dengan tetap mematuhi protocol kesehatan yang berlaku, seperti penggunaan masker. Sebanyak 40 persen responden yang memiliki pasangan dan belum menikha mengaku memiliki rencana menikah dalam beberapa bulan kedepan.sementara, mereka yang telah memiliki rencana menikha dalam waktu dekat dan sudah menentukan tanggal pernikahannya, sebanyak 54 persen diantaranya memutuskan untuk menikah di tahun 2022.[9]

Kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pernikahan di saat pandemi Covid-19. Kemajuan tersebut memberikan solusi bagi keluarga yang mempunyai hajat dalam melangsungkan pernikahan. Pernikahan online juga terjadi di Indonesia salah satunya yang dilakukan oleh Max Walden dan Shaffira Gayatri. Mempelai pria berasal dari Australia dan mempelai perempuan berasal dari Surabaya Jawa Timur. Mereka sudah merencanakan pernikahan sejak akhir

[9] Dwi Murdaningsih, "Tren Pernikahan Era Pandemi, Lebih Intim Dan Ramah Teknologi," REPUBLIKA.CO.ID, 2021, https://www.republika.co.id/berita/qysmoy368/tren-pernikahan-era-pandemi-lebih-intim-dan-ramah-teknologi.

tahun 2019 dan memilih melaksanaka pernikahan pada tanggal 20 juni 2020. Saat virus corona mulai merabak, Max Walden dan Safira mlai berfikir realistis tentaang rencana pernikahan mereka dan sempat berniat menangguhkan sampai awal tahun depan, saat mendekati tanggal 20 Juni, keduanya kembali mendiskusikan kembali rencana pernikahan mereka, sakhirnya sehari sebelum 20 juni setelah meminta pendapat dari beberapa ulama soal mekanisme pernikahan jarak jauh, Max dan Fira memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan mereka. Max semakin yakin dengan keputusannya setelah ia ingat presiden ke-4 Indonesia, KH Abdurrahman Wahid, atau Gusdur, juga melangsungkan akad nikah lewat sambungan telepon. Namun pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai adalah pernikaha menurut agama saja (siri), karena keterbatasan waktu untuk mengurus berbagai dokumen di masa pandemi.

Dari contoh pernikahan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besarnya hampir sama dengan pernikahan yang berlangsung dalam 1 tempat, rukun dan syarat pernikahan tersebut telah terpenuhi, yaitu adanya mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, wali perempuan, saksi dan ijab qabul. Yang membedakannya hanya saja pernikahan ini dilakukan tidak di satu tempat atau terpisah tetapi prosesnya sama.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TEHADAP PERNIKAHAN SIRI ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Analisis Terhadap Regulasi dan Praktik Perkawinan Yang di laksanakan di Era Pandemi Covid-19

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan dalam satu majlis atau para pihak berada dalam satu tempat. Akan tetapi, dalam pernikahan yang dilakukan secara online itu, para pihak tidak dalam satu majlis. Artinya pernikahan tersebut dilakukan tidak saling berhadap-hadapan dalam satu tempat. Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara online tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang diwakilkan atau melalui sepucuk surat. Hanya saja yang menjadi permasalahannya ialah berkaitan dengan ijab dan qabul dalam satu majlis.

Adanya perbedaan pendapat dikalangan Ulama' madzhab terkait ijab dan qabul dalam satu majlis menjadi permasalahan di dalam implementasi yang dilakukan oleh masyarakat, terlebih lagi mengenai pernikahan online yang dianggap sebagai kajian kontemporer.

Baru- baru ini terjadi pernikahan online yang terjadi di Indonesia salah satunya yang dilakukan oleh Max Walden dan Shaffira Gayatri. Mempelai pria berasal dari Australia dan mempelai perempuan berasal dari Surabaya Jawa Timur. Mereka sudah merencanakan pernikahan sejak akhir tahun 2019 dan memilih melaksanaka pernikahan pada tanggal 20 juni

2020. Saat virus corona mulai merabak, Max Walden dan Safira mlai berfikir realistis tentaang rencana pernikahan mereka dan sempat berniat menangguhkan sampai awal tahun depan, saat mendekati tanggal 20 Juni, keduanya kembali mendiskusikan kembali rencana pernikahan mereka, sakhirnya sehari sebelum 20 juni setelah meminta pendapat dari beberapa ulama soal mekanisme pernikahan jarak jauh, Max dan Fira memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan mereka. Max semakin yakin dengan keputusannya setelah ia ingat presiden ke-4 Indonesia, KH Abdurrahman Wahid, atau Gusdur, juga melangsungkan akad nikah lewat sambungan telepon. Namun pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai adalah pernikaha menurut agama saja (siri), karena keterbatasan waktu untuk mengurus berbagai dokumen di masa pandemi.[1]

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya kemudian dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis, bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan dari dilangsungkannya perbuatan hukum yang berupa perkawinan. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang hukum perkawinan[2] yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan

[1] Souisa, "Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia Tetap Menikah Lewat Zoom."
[2] Nation, "Kompilasi Hukum Islam."

bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Meskipun demikian, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan tetap dianggap sah menurut agama dan kepercayaan, namun dianggap tidak sah secara hukum. Konsekuensi yuridis tersebut menjadikan pernikahan tidak sah akibat tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Sedangkan dalam konteks hukum Islam perkawinan tersebut sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya.

Perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan salah satu penyimpangan dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan[3]. Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan.

Faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahan antaralain: adanya faktor biaya yang dimana orang tersebut tidak mampu untuk membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatt tetapi dirahasiakan, belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang

[3] Michael, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

untuk merahasiakan pernikahannya. Pernikahan yang dilakukan oleh max walden yang dimana pernikahan tersebut dilakukan menurut agama saja dikarenakan waktu yang sangat mepet untuk mengurus berkas-berkas pernikahan dan kondisi darurat covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu. Dalam kondisi tersebut menurut saya tidak menjadi masalah akan tetapi alangkah baiknya setelah kondisi membaik pernikahan harus diulang dan dicatatkan menurut ketentuan undang-undang.

Menurut ketetapan Majelis Ulama Indonesia diterangkan didalam buku himpunannya pada bagian prosedur pernikahan, bahwa MUI menyatakan: pertama, pernikahan dalam agama Islam adalah sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Kedua ketentuan umum tentang syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, wali, ijab qabul, serta mahar.[4]

Pada tanggal 2 April 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama kembali mengeluarkan Surat Edaran nomor: P-003/DJ.III/Hk.007/04/2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal nomor: P-

[4] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Social Dan Budaya* (jakarta: Erlangga, 2015).

002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang pelaksanaan protocol penanganan Covid-19 pada area public di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pada bagian ketentuan huruf E angka 3 disebutkan:

a. Point a diubah menjadi:
   Pencegahan penyebaran Covid-19 pada layanan KUA
   1. Pendaftaran nikah tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenag.go.id;
   2. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa dadrurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya;
   3. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020;
   4. Pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA;
   5. Tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilakasanakan secara daring (online);
   6. Memberitahukan kepada masyarakat nomor kontak atau email petugas layanan KUA agar pelaksanaan pelayanan secara daring dapat terlaksana dengan optimal; dan
   7. Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnnya tidak diperkenankan.
b. Point b diubah menjadi:

Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di KUA:

1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang dalam satu ruangan;
2. Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti akad nikah harus telah membasuh tangan dengan sabun/ handsanitizer dan menggunakan masker; dan
3. Petugas, Wali Nikah dan Calon Pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab Kabul.

c. Point e (baru)

Petugas layanan melaksanakan dengan sungguh-sungguh hal berikut:

1. Memastikan protocol pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelayanan dipatuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kedisiplinan , serta menolak pelayanan yang tidak sesuai protocol sebagai bentuk kesungguhan dalam penerapannya;
2. Menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan layanan serta menunda permintaan pelayananyang membutuhkan tatap muka secara langsung; dan
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan apparat pemerintah daerah beserta pihak keamanan untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap tingggal dirumah, menjaga jarak

aman (*physical/ social distancing*), menghindari kerumunan, menunda resepsi dan pernikahan.

d. Point f (baru)

Memahami bahwa tingkat kedaruratan ditiap daerah berbeda, KUA wajib meningkatkan koordinasi, mematuhi serta menyelaraskan penyelenggaraan layanan masyarakat sesuai dengan perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencegahan Covid-19 di wilayahnya.[5]

Dengan adanya perubahan dari surat edaran tersebut maka sudah jelas bahwa KUA tidak melakukan pelaksanaan perkawinan selama masa darurat Covid-19 kecuali yang sudah mendaftarkan pernikahan sebelum tanggal 01 April 2020. Pendaftaran tetap dapat dilakukan tetapi secara online melalui web simkah.kemenag.go.id. dengan adanya surat edaran ini, maka secara tidak langsung akan banyak sekali warga yang menunda pernikahan mereka dan itu memang ditujukan untuk menunda penyebaran Covid-19 ini. Akan tetapi dari hal tersebut pasti banyak sekali mudarat yang akan terjadi salah satunya yaitu adanya nikah siri dengan alasan pemerintah yang tidak melayani akad nikah.

Munculnya Surat Edaran dari Menteri Agama bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar melaksanakan protocol penanganan Covid-19 yang maksud dan tujuannya adalah mencegah, mengurangi dan melindungi pegawai serta

[5] Kementrian Agama RI, "Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Perubahan SE No.P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020."

melindungi masyarakat serta memastikan jalannya pelaksanaan tugas dan sungsi serta layanan Dirjen Bimas Islam tetap efektif dan efisien. Praktek pelaksanaan perkawinan pada saat turunnya Surat Edaran yang pertama yakni pernikahan diizinkan entah di KUA maupun di luar KUA akan tetapi dengan tetap memenuhi protocol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah serta meniadakannya semua jenis pelayanan selain pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA.

Beberapa saat setelah turunnya Surat Edaran yang pertama, pemerintah menurunkan Surat Edaran lanjutan karena semakin meluasnya penyebaran wabah Covid-19 dirasa perlu untuk mengubah beberapa poin didalamnya. Poin-poin penting yang diubah yakni pelaksanaan pernikahan yang hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftar sebelum tanggal 01 April 2020 serta pelayanan akad nikah diluar KUA ditiadakan dan meminta untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA. Pihak KUA tetap melayani pendaftaran nikah secara online melalui web simkah.kemenag.id dan pihak KUA juga melayani konsultasi ataupun pelayanan lainnya secara *daring*. Pada saat turunnya Surat Edaran yang kedua ini pernikahan ditangguhkan, banyak calon pengantin yang harus menunda tanggal pernikahannya dan menunggu sampai batas waktu yang belum di tentukan.

Setelah penangguhan perkawinan sejak tanggal 01 April 2020 tersebut, Dirjen Bimas Islam menurunkan Surat

Edaran yang ketiga yakni karena meluas dan meratanya penyebaran Covid-19 yang ditanda dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan nikah, maka Dirjen Bimas Islam dirasa perlu untuk menetapkan ketentuan lanjutan yang poin utamanya yaitu pelaksanaan nikah yang hanya boleh dilakukan di KUA dan pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai tanggal 23 April 2020 melebihi tanggal itu tidak dapat dilaksanakan akad nikahnya sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Itu artinya pelaksanaan pernikahan ditunda lagi untuk beberapa saat.

Beberapa hal yang sudah dicantumkan dalam Surat Edaran Menteri Agama bahwa Kantor Urusan Agama tidak melayani pelaksanaan pernikahan bagi yang mendaftar setelah tanggal 01 April 2020 sampai turunnya Surat Edaran selanjutnya. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya warga yang harus menunda pernikahan mereka dan adapula yang melakukan pernikahan siri. Sedangkan pernikahan siri juga bertentangan dengan ketentuan pemerintah sebab ada banyak sekali dampak negative dari pernikahan siri tersebut bagi sang istri.

Adapun beberapa dampak dari adanya penangguhan perkawinan yang dapat disimpulkan oleh penyusun antara lain:

a. Menimbulkan banyaknya pernikaha siri
b. Merugikan keluarga pengantin ataupun pengantin yang sudah mempersiapkan keperluan untuk resepsi

c. Pekerjaan di Kantor Urusan Agama terhambat
d. Memungkinkan timbulnya zina

Para Ulama sepakat bahwa pernikahan dianggap sah jikka memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Berbeda dengan perspektif fikih, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membahas adanya rukun perkawinan. UU perkawinan lebih menekankan pada hal-hal yang menyangkut syarat materil dan formil perkawinan seperti persetujuan kedua belah pihak dan batasan umur mempelai sebagaimana yang tercantum dalam Bab II Pasal 6 dan 7, meski demikian, UU perkawinan menganggap sahnya perkawinan tetap dikembalikkan kepada aturan agama Pasal 2 Ayat 1: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selain itu, masalah akad seperti ijab dan Kabul juga tidak dibahas dalam UU perkawinan.

Jika masalah syarat tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan, maka dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) semua syarat dijelaskan secara terperinci menyerupai pada pembahasan kitab-kitab fikih klasik[6]. Kemudian terkait syarat ijab dan qabul, diatur pada pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu." Lalu diatur dalam pasal 29 ayat (1)-(3), bahwa:

1. Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

2. Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.[7]

Selanjutnya pada Pasal 28: akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Dan pasal 29: dijelaskan kebolehan mewakilkan hak perwalian kepada orang lain jika akad nikah tidak dapat dilaksanakan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan pemberian kuasa untuk mewakili mempelai pria ketika mengucapkan Kabul, tetapi dalam pasal 29 ayat 3 dijelaskan juga: yang mana dalam hal ini (mewakilkan mempelai pria) calon mempelai wanita dan juga walinya merasa keberatan, maka akad nikah tersebut tidak boleh dilangsungkan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pengaturan kemungkinan berlakunya ijab dan Kabul ditempat berbeda belum dapat diberikan secara jelas sebagaimana dalam masalah pernikahan via live streaming tersebut.[8]

Salah satunya diantara rukun dan syarat pernikahan ialah mengenai wali nikah yang mana telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19[9]: wali nikah dalam

[7] Nation, "Kompilasi Hukum Islam."
[8] Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama* (Makassar: Alauddin University press, 2011).
[9] Nation, "Kompilasi Hukum Islam."

perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Kemudian pada pasal 20[10]: diterangkan pula bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Adapun masalah saksi, KHI cenderung berpegang pada pendapat Syafi'iyyah yang menyaratkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Yang mana diatur dalam Bab IV rukun dan syarat pernikahan, Pasal 24,25, dan 26 pada bagian ke-empat yaitu tenntang saksi nikah: pasal 24[11] ayat 1 dana 2 dijelaskan bahwa sasksi dalam perkawinan merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah, dan setiap perkawinan atau pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada Pasal 25[12] dijelaskan yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seseorang laki-laki muslim, adil, berakal, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. Kemudian dalam pasal 26 dijelaskan juga bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

---

[10] Nation.
[11] Nation.
[12] Nation.

Oleh karena itu, jika akad nikah dilakukan via online baik melalui telepon ataupun melalui computer, maka saksi wajib melihat langsung kedua belah pihak mengucapkan ijab dan qabul. Disini dapat dilihat bahwa keberadaan KHI berfungsi sebagai penjabaran dan pengembangan terhadap UU Perkawinan, sehingga perbedaan substansi dengan UU Perkawinan dipandang sebagai suatu kemajuan.

Apabila ikatan pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang berkekuatan hukum, maka selayaknya keberadaan KHI dapat diapresiasi untuk mengisi kekurangan dalam UU Perkawinan. Jika dikemudian hari pernikahan online digugat keabsahannya, maka posisi hukum nasional atau hukum positif sangat diperlukan.

Menurut apa yang telah diuraikan diatas, pernikahan yang dilakukan secara online tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya, baik didalam agama Islam ataupun didalam UU Perkawinan di Indonesia, mengenai bersatunya akad ijab qabul dalam satu majlis itu, ialah dalam satu tujuan atau pembahasan yang sama, hanya saja dihalangi oleh jarak sehingga pelaksanannya dilangsungkan secara terpisah. Kemudian mengenai nikah siri adalah sah menurut Agama tetapi tidak sah menurut Negara karena tidak dicatatkan di KUA.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Siri yang dilakukan secara Online di Era Pandemic Covid-19

Secara istilah umumnya bahwa pernikahan via online merupakan pernikahan yang dilakukaan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, dan

yang berada dalam jarak jauh, dimana sebagian dari rukun dan syarat dalam pernikahan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Sehingga mengharuskan terjadinya proses pernikahan atua proses ijab qabul melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang ada di layar.[13]

Hal ini memang masih dianggap aneh bagi beberapa kalangan masyarakat, yang mana di daeraah tertentu atau kebanyakan daerah di Indonesia menjadikan pernikahan sebagai budaya atau adat yang pelaksanaannya harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan itu sangat penting yang mana menyangkut tentang hubungan dan keluarga setelahnya, dan pernikahan harus berkesan karena hanya dilakukan sekali seumur hidup.

Baru-baru ini terjadi pernikahan yang dilakukan secara online, salah satunya adalah akad nikah yang dipraktikkan oleh pasangan oleh Max Walden dan Shaffira Gayatri. Mempelai pria berasal dari Australia dan mempelai perempuan berasal dari Surabaya Jawa Timur. Mereka sudah merencanakan pernikahan sejak akhir tahun 2019 dan memilih melaksanaka pernikahan pada tanggal 20 juni 2020. Saat virus corona mulai merabak, Max Walden dan Safira mlai berfikir realistis tentaang rencana pernikahan mereka dan sempat berniat menangguhkan sampai awal tahun depan, saat mendekati tanggal 20 Juni, keduanya kembali mendiskusikan kembali rencana pernikahan

[13] Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon," *Jurnal Al-Qadar* 2, no. 2 (2015): 200.

mereka, sakhirnya sehari sebelum 20 juni setelah meminta pendapat dari beberapa ulama soal mekanisme pernikahan jarak jauh, Max dan Fira memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan mereka. Max semakin yakin dengan keputusannya setelah ia ingat presiden ke-4 Indonesia, KH Abdurrahman Wahid, atau Gusdur, juga melangsungkan akad nikah lewat sambungan telepon. Namun pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai adalah pernikaha menurut agama saja (siri), karena keterbatasan waktu untuk mengurus berbagai dokumen di masa pandemi.[14]

Dalam fikih kontemporer nikah siri dikenal dengan istilah *zawaj 'urfî* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikaahan tetappi tidak tercatat resmi oleh pegawai pemerintah (KUA). Disebut nikah 'urfi (adat) karena pernikahan ini merupakn adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat mslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad nikah mereka tanpa ada permaasalahan dalam hati mereka. Pernikahan siri dapat disahkan dengan dua cara yakni mengajukan isbath nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang.

Hukum nikah siri secara Agama adalah sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Pada prinsipnya, selama nikah siri memenuhi rukun dan syarat yang disepakati oleh ulama' maka

[14] Souisa, "Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia Tetap Menikah Lewat Zoom."

dapat dipastikan bahwa nikah tersebut adalah sah. Pendaoat ulama Islam adalah sebagai berikut:

1. Menurut Madzhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah nikah siri.
2. Menurut madzhab Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi utuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikaha tersebut adalah batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah siri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya, jika penyembunyian itu khawatir dari orang zalim atau semisalnya maka hukumnya wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.
3. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah siri adalah yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Beliau berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.
4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, disisi lain nikah yang tidak dicatatkan selama ada dua orang saksi tetap sah menurut hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah siri dapat mengakibatkan

dosa bagi pelakunya, karena sudah melanggar ketentuan yangditetapkan pemerintah.[15]

Hukum Islam dibedakan menjadi dua, pertama hukum Islam dalam kategori syariah dan kedua hukum Islam dalam kategori fiqih. Syariah adalah al-mutawatirah, karena ia bersifat mutlak dan pasti serta tetap hukumnya, sedangkan fiqh adalah pemahaman terhadap syariah. Dengan demikian, fiqih adalah hasil ijtihad manusia, sehingga ia bersifat relative dan temporal. Dalam hla ini yang dimaksud adalah hukum Islam kategori fiqih yang merupakan hasil ijtihad manusia, bukan hukum Islam dalam kategori syariah.[16]

Pernikahan merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang disyari'atkan Allah kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan dan antara laki-laki dengan perempuan sebagai khalifah di bumi. Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrom dimana segala sesuatu yang asal mulanya haram dilakukan menjadi halal dilakukan, segala sesuatu yang asal mulanya dilarang untuk melakukannya di antara kedua belah pihak menjadi sesuatu yang diperintahkan diantara keduanya.

Hukum pernikahan sangat penting di dalam Islam, karena mengatur tentang tatacara hidup berkeluarga, yang mana merupakan inti dalam kehidupan bermasyarakat, serta

---

[15] Paraga Sukardi, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)," *Jurnal Pendais* 1, no. 2 (2019): 144–51,

[16] Iskandar Usman, *Islam Dan Perubahan Hukum Islam* (jakarta: Raja grafindo persada, 1994).

kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian yang penting untuk kita taati dan laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tepat, berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.[17]

Hukum asal menikah ialah Sunnah bagi orang yang membutuhkannya, akad nikah pada dasarnya dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua calon pasangan, yang dinyatakan melalui akad ijab qabul. Akad nikah tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil (terpercaya)[18] Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاح إِلَّا ولِي وشاهدي عدل

"Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Adapun rukun nikah yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama ialah: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, sighat ijab qabul. Jadi pernikahan yang dilaksanakan secara online diatas sudah memenuhi ketentuan rukun daan syaratnya, hanya saja yang menjai perdebatan pada saat ini mengenai ijab qabul dalam artian satu majlisnya. Pernikahan yang dilangsungkan secara online itu tersendiri

[17] Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon."
[18] Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i* (jakarta: Fathan Media Prima, 2018).

memang dilakukan dengan dua tempat yang berbeda namun masih dalam satu maksud yang sama.[19]

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencangkup ijab dan qabul, antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan tidaklah dianggap sah suatu pernikahan tersebut apabila dilakukan hanya kamu suka sama suka tanpa adanya akad.[20] Oleh karena itu, ijab qabul merupakan hal yang paling mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh seorang wali, sebagai persyaratan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela menikahi calon isterinya.[21]

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa ijab qabul diangap sah apabila berlakunya tidak bergantung kepada persetujuan orang lain. Apabila beberapa keabsahannya ijab qabul yaitu, pertama masing-masing pihak yang melakukan ijab dan qabul sudah dewasa (berakal sehat, baligh dan merdeka). Kedua, masing-masing pihak yang melakukan ijab dan qabul mempunyai wewenang untuk melakukan ijab dan qabul secara

[19] Ghozali, *Fiqih Munakahat*.
[20] Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*.
[21] Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*.

langsung. Jumhur ulama menyatakan bahwa ijab qabul harus memenuhi beberapa unsur[22]:

1. Diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan, maka boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu
2. Dilaksanakan dalam satu majlis
3. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan apa yang sedang dilakukan.

Tidak boleh digantungkan dalam satu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Masing-masing pihak wajib mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan oleh masing-masing pihak diwaktu akad nikah. Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa para ulama sepakat mensyaratkan satu majlis dalam melaksanakan ijab qabul. Dengan demikian apabila ijab qabul tidak dilaksanakan dalam satu majlis, maka akad nikah dianggap tidak sah. Para ulama terbagi dalam dua kelompok dalam menafsirkan *ittihad majlis* (satu majlis).

. Pendapat pertama, yang dimaksud dengan ittihad al-majlis adalah, ijab dan harus dilakukan dalam satu waktu upacara akad nikah, bukan dilaksanakan dalam waktu yang

[22] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (jogjakarta: liberty, 1999).

terpisah. Dalam hal ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun jika tetap ada kesinambungan anatara ijab dan qabul, atau anatara ijab dan qabul itu terputus, maka hukum akad nikah tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan Islam

Dengan demikian adanya persyaratan satu majlis hubungan dengan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya dalam satu majlis, tetapi apabila dilakukan dalam dua wkatu atau dua acara yang terpisah, maka kesinambungan anatara ijab dan qabul sudah tidak terwujud, sehingga akad nikahnya dipandang tidak sah.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqih al-Sunnah menjelaskan arti satu majlis dalam melaksanakan akad nikah, yang menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan qabul. Al-Jaziri memperjelas pengertian satu majlis dalam madzhab Hanafi ialah dalam hal seorang pria berkirim surat mengakadkan nikah kepada perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat dibacakan didepan wali wanita dan para saksi, dalam majlis yang sama setelah dibacakannya surat tersebut, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan qabul-nya.[23]

[23] Abdurrahman Aljaziri, *Al-Fiqh Ala Madzhabil Arba'ah* (Libanon Beirut: Darul Fikri, 1990).

Akad nikah tersebut dikalangan madzhab Hanafi dianggap sah, dengan alasan bahwa pembicaraan ijab yang terdapat dalam surat calon suami, dan pengucapan qabul dari pihak wali perempuan, sama-sama diengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya.

الحاضر من الخطاب بمنزلة الغائب من الكتابة

Artinya: *"tulisan dari orang yang ghaib (tidak ada di tempat), posisinya sama dengan ucapan orang yang hadir (berada di tempat)".*

Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru mengucapkan aakd nikah dari pihak para wali. Praktik tersebut dianggap boleh menurut madzhab Hanafi. Namun perlu digaris bawahi bahwa, dalam contoh tersebut yang didengar oleh para saksi adalah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depannya, dan si pembaca surat dalam hal ini bukan sebagai wakil dari calon suami, karena yang disebut terakhir ini dalam suratnya tidak mewakilkan dengan seorangpun.

Apa yang dibacakan dari surat itu tidak lain dari redaksi langsung dalam bentuk tulisan calon suami, hal tersebut sejalan dengan penjelasan sayyid sabiq bahwa apabila salah seorang dari dua pihak yang akan melakukan akad nikah secacra gaib (tidak bisa hadir), maka jalan keluarnya adalah, dapat mengutus

wakil, juga dapat dilakukan dengan menulis surat kepada pihak lain untuk melakukan akad nikahnya. Bagi yang menerima surat itu, dan juga menyetujui isi surat itu, hendaknya menghadirkan para saksi dan di depan mereka redaksi surat itu dibacakan.

Ulama hanafiyah berpendapat akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-tamlik* (pernikahan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay'* (penjualan), *al-'atha* (pemberian), *al-ibaha* (pembolehan) dan *al- ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan nikah, akan tetapi tidak sah dilakukan dengan lafal *al-ijarah* (upah) atau *al-'ariyah* (pinjaman), sebab dua kata tersebut memberi arti kelestarian atau *kontinuitas*[24]

Para penganut mazhab Hanafi menggunakan dalil berupa riwayat yang dimuat dalam shahih al-bukhari dan shahih muslim:

أنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ : يا رَسولَ اللَّهِ، جِئْتُ لأهَبَ لكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إلَيْهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إلَيْهَا وصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أنَّه لَمْ يَقْضِ فِيهَا شيئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِن أصْحَابِهِ، فَقالَ: أيْ رَسولَ

[24] Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*.

اللَّهِ، إنْ لَمْ تَكُنْ لكَ بهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقالَ: هلْ عِنْدَكَ مِن شيءٍ؟ قالَ: لا واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: اذْهَبْ إلى أهْلِكَ فَانْظُرْ هلْ تَجِدُ شيئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقالَ: لا واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ ما وجَدْتُ شيئًا، قالَ: انْظُرْ ولو خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقالَ: لا واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ ولَا خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ، ولَكِنْ هذا إزَارِي – قالَ سَهْلٌ: ما له رِدَاءٌ – فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما تَصْنَعُ بإزَارِكَ؟ إنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا منه شيءٌ، وإنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ منه شيءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ، ثُمَّ قَامَ، فَرَآهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُوَلِّيًا فأمَرَ به فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قالَ: مَاذَا معكَ مِنَ القُرْآنِ؟ قالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وسُورَةُ كَذَا وسُورَةُ كَذَا – عَدَّدَهَا – قالَ: أتَقْرَؤُهُنَّ عن ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: اذْهَبْ فقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بما معكَ مِنَ القُرْآنِ.

"seorang wanita datang kepada Nabi SAW, dan berkata: "Ya Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuhan". Nabi SAW mengangguk-anggukkan kepalanya tanpa menjawab, lalu seseorang diantara yang hadir disitu berkata,

"kalua tuan tidak menginginkannya, maka kawinkanlah saya dengan dia". Nabi lalu bertanya kepada laki-laki itu, "Apakah engkau punya sesuatu (untuk maskawinnya)?, laki-laki itu menjawab tidak, demi Allah. "Nabi bertanya lagi, "Adakah sebagian dari Al-Qur'an yang engkau hafal, orang itu menjawab, "ada". Kemudian Nabi berkata kepadanya "Aku jadikan dia sebagai milikmu dengan (maskawin) bacaan Al-Qur'an yang ada padamu".

Menurut Sayyid Sabiq praktek pernikahan seperti itu adalah sah, sepanjang pengucapan qabul-nya dilakukan langsung dalam satu majlis. Dalam praktik tersebut jelas bahwa dua orang saksi itu hanya mendengar redaksi isi surat yang dibacakan di depannya, dan bukan dalam bentuk takwil (diwakilkan kepada orang lain). Imam Hanafi berhujjah dengan qiyas yaitu apabila wanita bebas dalam aqad jual beli dan akad urusan-urusan lain, maka mereka juga bebas secara mutlak tentang akad perkawinan mereka. Ini karena tidak ada perbedaan antara satu akad dengan akad yang lain. Mereka juga mengqiyaskan wanita dengan lelaki dalam mewalikan diri sendiri setelah aqil baligh. Menghalangi wanita yang baligh dan aqil mengawinkan dirinya dengan laki-laki yang sekufu adalah bersalahan dengan prinssip-prinsip Islam yang asas (qawa'id al-islam al-'ammah).

Imam Hanafi menggunakan dalil analogi atau at-taqdiri karena hal ini merupakan sebuah identitas dari madzhab Hanafi, karena pada awal pembentukan madzhab ini, Imam Hanafi

sebagai pencetus madzhab banyak menggunakan analogi sebagai dasar hukum, tetapi bukan hanya analogi saja yang digunakan dalam berinstinbath hukum, melainkan Imam Hanafi juga menggunakan dalil hadis nabi yang sejalan dengan pendapatnya atau analogi tersebut.[25]

Qabul yang diucapkan setelah ijab, adalah di antara hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami. Begitu sebaliknya, adanya jarak yang memutuskan ijab dan qabul, menunjukkan bahwa calon suami tidak lagi sepenuhnya telah untuk mengucapkan qabul, dan wali nikah dalam jarak waktu itu dianggap sudah tidak lagi pada pendirian semula, atau telah tidak sejalan dengan yang semestinya.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa satu majlis disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qabul semata, akan tetapi berkaitan erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi. Saksi harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ijab dan qabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.

Pendapat kedua ini lebih tegas menyatakan bahwa keabsahan ijab dan qabul, baik dari redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Pendapat dipegangi oleh para ulama Syafi'iyah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan menyatakan bahwa kesaksian orang buta tidak diterima untuk

[25] Abi Daud Sulaiman, *Sunanu Abi Dawud* (Riyad: Dar Al-Islam, 1995).

akad nikah. Hal tersebut diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Haitami yang menolak kesaksian nikah didasarkan atas penglihatan dan pendengaran.[26]

Menurut kelompok kedua ini, bahwa kesaksian orang buta disamakan dengan kesaksian seseorang yang sedang berada dalam gelap gulita, sehingga orang yang berada di dalam alam gelap gulita itu sama dengan orang buta yang tidak dapat melihat orang yang melakukan akad nikah. Oleh karena itu, ia tidak dapat memastikan dengan yakin bahwa ijab dan qabul benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa keabsahan atau kesahan kesaksian akad nikah adalah keyakinan yang harus diwujudkan oleh para saksi dalam menyaksikan akad nikah. Meskipun suatu redaksi dapat diketahui siapa pembicaranya dengan jalan mendengarkan suara saja, namun kekuatan bobotnya tidak akan sampai kepada tingkat keyakinan apabila dilihat pengungkapannya dengan mata kepala. Sedangkan dalam akad nikah , tingkat keyakinan yang disebut terakhir inilah yang diperlukan.

Pandangan tersebut erat hubungannya dengan sikap para ulama, terutama dikalangan syafi''iyah. Kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan penglihatan, sehingga menurut pandangan ini ijab dan qabul melalui surat tanpa diwakilkan juga tidak sah. Imam Syafi'I mempunyai dua

[26] Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*.

pandangan , yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jaded, qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama al-hujjah, yang dicetuskan di Iraq.

Qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang berjudul al-Umm, yang dicetuskan di Mesir. Selain itu pola pemikiran Imam Syafi'I merujuk kepada al-Qur'an, al-sunnah, Ijma', Qiyas untuk menentukan suatu hukum yang harus ditetapkan sebagai hujjah. Imam Syafi'I menggunakan qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum (Al-Qur'an, Hadis, Ijma') tidak tercantum, dan dalam keadaan memaksa.

Hukum Qiyas yang dipakai hanya terbatas dalam hukum muamalah. Karena menurut beliau segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Disini jelas bahwa kriteria ataupun karakteristik oleh kedua madzhab memiliki perbedaan dari istinbath hukum maupun illatnya.(alasan) hukum.

Pernikahan yang dilakuakn secara online masih menimbulkan ketidakpastian hukum atau kesamaran. Ketidakpastian ini disebabkan atas sejumlah ketentuan dan persoalan yaitu:

1. Nikah adalah perkara ibadah
2. Persyaratan *al-mu'ayyanah*
3. Peluang manipulasi
4. Ketimpangan konektivitas

5. Terdapat ketentuan dari pemerintah yang memiliki derajat seperti *qanun*[27]

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis cenderung mendukung pandangan kontra akad nikah yang dilakukan via online, karena selaras dengan prinsip kepastian dan kehati-hatian. Kemudian mengenai nikah siri yang dilakukan adalah sah menurut agama sedangkan menurut undang-undang adalah tidak sah, karena tidak dicatatkan di KUA.

[27] Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian beberapa bab diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai jawaban tentang pernikahan online di masa Pandemi Covid-19 menurut hukum Islam. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari yang penulis paparkan diatas adalah sebagai berikut:

Akad nikah via online menggunakan aplikasi video call berbasis internet tidak dapat diperkenankan atas sebab keharusan ittihad majlis (satu majlis) secara fisik. Sedangkan perluasan makna ittihad majlis yang dikatakan dapat terealisasi secara daring mengandung kelemahan yang beresiko besar karena sejumlah factor yakni: nikah adalah ibadah, persyaratan al-mu'ayanah, peluang manipulasi, ketimpangan konektivitas, dan terdapat ketentuan pemerintah yang memiliki derajat seperti qanun. Solusi dari dua calon mempelai yang terpisah jarak dan sulit bertemu karena terhalang kebijakan serta protocol kesehatan yang terkait dengan pandemic, dapat tetap melaksanakan akad nikah dengan cara calon mempelai pria melakukan tawkil kepada orang yang ia percaya untuk mewakilkan dirinya sebagai calon mempelai pria dalam prosesi akad nikah bersama wali nikah. Cara ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian mengenai nikah siri yang dilakukan adalah sah menurut agama tetapi tidak sah menurut Negara karena

pernikahan tersebut tidak dicatatkan, solusi dari kedua mempelai tersebut adalah mendaftarkan pernikahannya sehingga jelas keabsahannya baik menurut agama maupun negara.

B. Saran

Penelitian ini merupakan suatu masalah kontemporer yang ada akibat perkembangan zaman, yang mana dalam penggunaan media teknologi atau media telekonferensi terhadap pelaksanaan akad nikah harus dan sangat diperlukan pemahaman yang mendalam, agar tidak menyalahi syari'at atau aturan yang sudah ditetapkan Allah SWT.

1. Bagi pihak akademisi

   Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/I dikemudian hari, baik sekedar unntuk menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa, atau untuk melakukan penelitian lanjutan.
2. Bagi peneliti

   Hasil dari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan, baik dalam ruang lingkup penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.
3. Bagi Pemerintah

   Penulis menyarankan kepada Pemerintah khususnya Kementrian Agama Pusat yang telah mengeluarkan Surat

Edaran tersebut agar dapat menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat pandemi Covid-19. Dalam hal ini, menyesuaikan dari masing-masing wilayah karena tingkat penyebaran covid-19 di masing-masing daerah berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid Hakim. *Mabadi Awaliyah*. jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman Aljaziri. *Al-Fiqh Ala Madzhabil Arba'ah*. Libanon Beirut: Darul Fikri, 1990.

Abi Daud Sulaiman. *Sunanu Abi Dawud*. Riyad: Dar Al-Islam, 1995.

Agus, Mahmudin Bunyamin, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi. *Ensiklopedia Imam Syafi'i, Biografi Dan Pemikiran Madzhab Fiqih Terbesar Sepanjang Masa, Terjemah Dari Al-Imam Al-Syafi'i Fi Madzhabihi Al-Qadim*. jakarta: Hikmah, 2008.

Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Makassar: Alauddin University press, 2011.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*. jakarta: kencana, 2003.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Bakhtiar, Faizal Bachrong dan Fathur Marzuki dan Handar Subhandi. "Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar" 7, no. 1 (2019): 49–62.

Dwi Murdaningsih. "Tren Pernikahan Era Pandemi, Lebih Intim Dan Ramah Teknologi." REPUBLIKA.CO.ID, 2021. https://www.republika.co.id/berita/qysmoy368/tren-pernikahan-era-pandemi-lebih-intim-dan-ramah-teknologi.

Emas, Mahardika Putera. "Problematika Akad Nikah Via Daring

Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 68. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Iskandar Usman. *Islam Dan Perubahan Hukum Islam*. jakarta: Raja grafindo persada, 1994.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020," 2020.

Kementrian Agama RI. "Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020." *Kementrian Agama*. Jakarta, 2020.

———. "Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Perubahan SE No.P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020." Jkarta, 2020.

KN Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga Dakam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Social Dan Budaya*. jakarta: Erlangga, 2015.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. jakarta: bumi aksara, 2008.

Michael, Tomy. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mimbar Keadilan*. jakarta, 2017. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195.

Moh Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Moh Rifa'i. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.

Mufidah, Fina. "Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'Ah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 1689–99. http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/10302/1/FINA MUFIDAH-1.pdf.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. jakarta: Lentera, 2011.

Muhammad Sabir. "Pernikahan Via Telepon." *Jurnal Al-Qadar* 2, no. 2 (2015): 200.

Mustafa Dieb Al-Bigha. *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*. jakarta: Fathan Media Prima, 2018.

Nation. "Kompilasi Hukum Islam." *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2001): 2176–81.

Nikah, Kitab. *Kitab Nikah BAB 1 Tentang Nikah Hadis Ke-780*, n.d.

Pemerintah, Peraturan, Republik Indonesia, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang No.16 Tahun 2019," no. 42 (2019).

Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng. *Fikih II*. Makassar: Alaudin Press, 2010.

Safirra, aulia rahma. "Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perspektf Khi Dan Uu No.1 Tahun 1974)" 19, no. 1 (2020).

Satria Effendi M.Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan*

Ushuliyah. jakarta: kencana, 2004.

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. "PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan," 1975, 22.

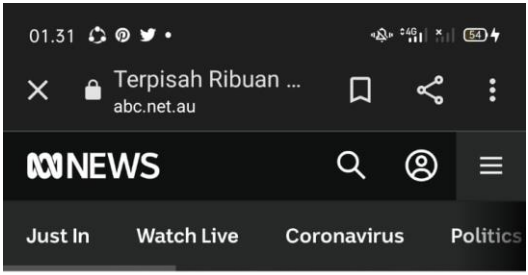
Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. jogjakarta: liberty, 1999.

Souisa, Hellena. "Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia Tetap Menikah Lewat Zoom." ABCNEWS, 2020. https://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-01/pasangan-indonesia-dan-australia-menggelar-akad-nikah-lewat-zoom/12407008.

Sukardi, Paraga. "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)." *Jurnal Pendais* 1, no. 2 (2019): 144–51. file:///C:/Users/Asus/Downloads/617-Article Text-1960-1-10-20200319.pdf.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu, Terjm. Abdul Hayyie Al-Kttani, Dkk*. Edited by Gema Insani. jakarta, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAHASA INDONESIA

Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia Tetap Menikah Lewat Zoom

Oleh Hellena Souisa

Posted Wed 1 Jul 2020 at 12:41pm



Max Walden dan Shaffira Gayatri baru-baru ini menggelar akad nikah lewat Zoom karena tidak mungkin melakukannya di Surabaya di tengah



Max Walden

@maxwalden_

Getting married on video call tomorrow but I hear Gus Dur got hitched over the phone. If it's good enough for him it's good enough for me

Terjemahkan Tweet

23:11 · 19 Jun 20 · Twitter for iPhone



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri
   1. Nama : Muhammad Aminun Najib
   2. NIM : 1702016156
   3. Tempat dan Tanggal Lahir: Demak, 22 Agustus 1999
   4. Alamat : Sandan Rt 04 Rw 02 Sidokumpul, Kec. Guntur Kab. Demak.
   5. Jenis Kelamin : Laki-laki
   6. Agama : Islam

B. Riwayat Pendidikan
   1. TK MEKARSARI : Lulus Tahun 2005
   2. SDN SIDOKUMPUL 2 : Lulus Tahun 2011
   3. MTs FUTUHIYYAH 1 : Lulus Tahun 2014
   4. MA FUTUHIYYAH 1 : Lulus Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 6 Desember 2021

Muhammad Aminun Najib

NIM. 1702016156